

DIPA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN APBN

**PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN**

TEMUAN BPK ATAS LK TA 2016

- 1) Sistem Pengendalian Internal Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Kemhan dan Tni Tahun 2016 belum memadai.
- 2) Penatausahaan Persediaan Belum memadai dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Kemhan dan Tni Tahun 2016
- 3) Penatausahaan Asset Tetap dalam Aplikasi SIMAK BMN pada Kemhan dan Tni Tahun 2016 belum memadai.
- 4) Penatausahaan utang BMP belum memadai dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Kemhan dan Tni Tahun 2016.

LANJUTAN TEMUAN BPK

- 5) Pengelolaan Hibah di lingkungan Kemhan dan Tni belum sepenuhnya tertib.
- 6) Pengelolaan PNBP Fungsional di lingkungan Rumkit Unit Organisasi Kemhan dan Tni belum berjalan secara optimal.
- 7) Pemanfaatan BMN di lingkungan Kemhan dan Tni belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- 8) Pelaksanaan pekerjaan pada Kemhan dan Tni belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2016 senilai Rp8,68 Triliun
- 9) Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemhan dan Tni belum sesuai ketentuan.

MANFAAT DIPA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN APBN

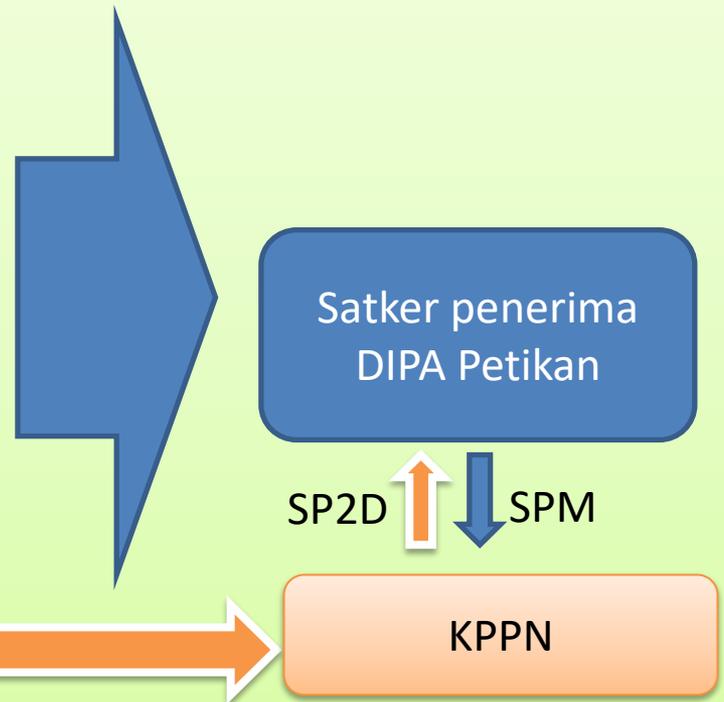
- 1. PENGGUNAAN AKUN BELANJA BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK BELANJA MODAL ATAU SEBALIKNYA TANPA IJIN KEMKEU TIDAK AKAN TERJADI**
- 2. PEKERJAAAN LINTAS TAHUN TANPA IJIN KEMKEU TIDAK AKAN TERJADI**
- 3. PENATA USAHAAN PERSEDIAAN TERTIB**
- 4. PENATA USAHAAN ASET TERTIB**
- 5. PENCATATAN HIBAH TERTIB**
- 6. PENCATATAN PNBK RUMKIT TERTIB**
- 7. SISTEM PENGANGGARAN DAN KEUANGAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN**
- 8. PELAKSANAAN APBN KEMHAN TNI SESUAI ATURAN**

BAGAIMANAKAH CARANYA ?

SATKER PENERIMA DIPA PETIKAN **BUAT LK** → **LAPORAN KEUANGAN**

PEJABAT PERBENDAHARAAN :

- ❖ KPA
- ❖ PPK
- ❖ PPSPM
- ❖ BENDAHARA PENERIMAAN
- ❖ BENDAHARA PENGELUARAN
- ❖ UNIT PERENCANAAN
- ❖ UNIT KEUANGAN
- ❖ UNIT PENCATAT SIMAK BMN
- ☐ KEMENTERIAN KEUANGAN



PENGGUNAAN AKUN BELANJA BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK BELANJA MODAL ATAU SEBALIKNYA TANPA IJIN KEMKEU TIDAK AKAN TERJADI

SAAT INI:

Satker tanpa melaksanakan revisi anggaran dengan mudah bisa menggunakan akun bel barang digunakan untuk belanja modal atau sebaliknya.

Karena :

1. Kebijakan pimpinan
2. Pekas membayar tagihan
3. ALASAN akan dilaksanakan revisi



Tidak dilaksanakan

DIPA sebagai Otorisasi

Satker tidak bisa menggunakan akun belanja barang digunakan untuk belanja modal atau sebaliknya sebelum merevisi DIPA

Karena:

1. KPPN tidak mau membayar bila tagihan tidak sesuai ADK dari DIPA satker yang bersangkutan
2. Tidak ada toleransi tentang transaksi pembayaran karena dalam sistem yang bekerja adalah aplikasi komputer.

Kesimpulan

Pergeseran akun pada anggaran tanpa revisi tidak akan dapat mencairkan anggaran.

PEKERJAAAN LINTAS TAHUN TANPA IJIN KEMKEU TIDAK AKAN TERJADI

Saat ini:

Satker tidak takut anggaran tahun berjalan hangus bila melewati Tahun Anggaran

Karena:

1. Ka Satker memerintahkan pekas agar dana kegiatan diselamatkan
2. Pekas tidak berani mengembalikan dana kepada kas negara
3. Penanda tangan kontrak tidak mempertimbangkan waktu selesai kegiatan

DIPA SEBAGAI PELAKS APBN

Satker tidak bisa melaksanakan kegiatan lintas tahun sebelum mendapat ijin dari Kemku

Karena :

- Anggaran Satker yang melewati Tahun berjalan bila tidak ada ijin Lintas tahun dari Kemku terhitung melebihi tanggal 31 Desember Pencairannya otomatis hangus.

Kesimpulan:

Pekerjaan lintas tahun tanpa ijin kemkeu tidak dapat dilaksanakan.

PENATA USAHAAN PERSEDIAAN TERTIB

Saat ini:

Penatausahaan Barang persediaan oleh Satker dilaksanakan belum tertib

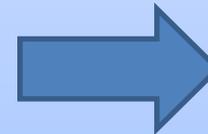
Karena :

1. Unit perencanaan pada satker tidak memeriksa hasil pengadaan barang.
2. Pekas tidak mengecek barang yang dibeli
3. Unit simak BMN tidak mencatat barang yang diadakan satker
4. Tidak ada rekon dalam satu satker antara unsur perencanaan, keuangan dan barang
5. Pengadaan barang diragukan kebenarannya.

DIPA SEBAGAI PELAKS APBN

Satker dalam pengadaan barang Persediaan dalam lingkungan satker maka :

1. Unit perencanaan akan mencatat dalam Pelaksanaan Anggaran.
2. Unit keuangan akan mencatat dalam LRA
3. Unit BMN akan mencatat dalam Simak
4. Ketiga unit melaksanakan rekon dalam satker yang sama
5. Penatausahaan persediaan akan tertib



Bila tidak sama
kasatker tidak
tanda tangan

Kesimpulan

Dengan DIPA sebagai Otorisasi pencatatan Persediaan menjadi tertib

PENATAUSAHAAN ASET TERTIB

SAAT INI :

Penatausahaan Asset yang dilakukan berjenjang secara Bottom Up dari tingkat Satker/Subsatker sampai Pus BMN Baranahan Kemhan , dan Satker tidak membuat Laporan Keuangan karena tidak menerima DIPA petikan

Kelemahannya:

1. Penelusuran terhadap data pada tingkat Unit Organisasi sangat sulit
2. Keakuratan data diragukan kebenarannya
3. Hasil PNBPN terhadap pemanfaatan aset tidak teradministrasi dengan baik
4. Pengawasan dan Pengendalian terbatas

DIPA SEBAGAI PELAKS APBN:

Penatausahaan Aset dapat dilaksanakan dengan tertib Karena:

1. Satker Penerima DIPA Petikan Membuat Laporan Keuangan sehingga Asset dapat dicatat oleh unsur perencanaan keuangan dan logistik dengan Benar dalam satker yang sama
2. kesalahan data dapat segera diketahui dan diperbaiki karena dalam satu satker.
3. Penerimaan PNBPN bersumber dari pemanfaatan aset dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.
4. Pengawasan dan pengendalian relatif mudah

Kesimpulan

Penatausahaan aset tertib dapat dicatat dengan tertib

PENCATATAN HIBAH TERTIB

Saat Ini :

Penatausahaan Hibah yang dilakukan berjenjang secara Bottom Up dari tingkat Satker/Subsatker sampai Pus BMN Baranahan Kemhan dan Satker tidak membuat Laporan Keuangan karena tidak menerima DIPA petikan

Kelemahannya:

1. Penelusuran terhadap data pada tingkat Unit Organisasi relatif lebih sulit
2. Keakuratan data diragukan kebenarannya
3. Pengawasan dan Pengendalian terbatas

DIPA SEBAGAI PELAKS APBN :

Penatausahaan Aset dapat dilaksanakan dengan tertib Karena:

1. Satker Penerima DIPA Petikan Membuat LK sehingga Hibah dapat dicatat Unsur Perencanaan, Keuangan dan Logistik dengan Benar
2. kesalahan data dapat segera diketahui dan diperbaiki
3. Penerimaan Hibah dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.
4. Pengawasan dan pengendalian relaif mudah

Kesimpulan :

Pencatatan hibah tertib

PENCATATAN PNBP RUMKIT TERTIB

Saat ini

Pengelolaan PNBP Rumkit dilaksanakan dengan mekanisme DIPA sebagai Otorisasi sejak Bulan Nopember 2016

Keuntungan

1. Administrasi pengelolaan anggaran dan keuangan transparan dan mudah ditelusuri
2. Efektif dan efisien
3. Pertanggungjawaban keuangan dan Laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan PNBP telah menggunakan DIPA PNBP

SISTEM PENGANGGARAN DAN KEUANGAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN

Saat Ini:

Mekanisme penganggaran:

1. Berjenjang Bottom Up dan Top Down dalam Birokrasi Kemhan
2. Menggunakan DIPA juga menggunakan Keputusan Otorisasi Menteri(KOM) dan Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (KOP)
3. Penerbitan KOM/KOP memperpanjang Birokrasi (3 Tingkatan)

Mekanisme Pendanaan:

1. Menggunakan Nota Pindah Bukuan (NPB) berjenjang Dari Kemkeu, Kapusku Kemhan sampai Pekas (4 Tingkat) dan baru dibayar oleh pekas ke Satker
2. Para Kepala Keuangan UO Membuat LK milik para satker
3. Pusku Buat LK Kementerian dgn merekap LK UO



Selama ini tidak pernah cocok

SEBAGAI PELAKS APBN

1. Berjenjang Bottom Up dan Top Down dalam Birokrasi
2. Menggunakan DIPA Petikan awal januari langsung dapat digunakan dlm Kegiatan (birokrasi lebih singkat)

Mekanisme Pendanaan:

- 1 Awal januari sudah dapat uang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- 2 Masing masing Satker buat LK dan direkap Keuangan UO
- 3 Kapusku Kemhan Merekap LK UO



Pasti cocok

Kesimpulan

Dengan DIPA sebagai otorisasi lebih efektif dan efisien

DIPA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN APBN SESUAI PERATURAN PMK NO 190 TAHUN 2012

Saat ini :

1. Kemhan.

Pelaksanaan APBN Berdasar Peraturan Bersama Menteri Nomor 67 tahun 2013 sebagaian besar masih menggunakan KOM/KOP/P3 sebagai dasar pelaksanaan Anggaran

2. Seluruh Kementerian / Lembaga.

Seluruh Kementerian/Lembaga (86 K/L) Menggunakan PMK Nomor 190 tahun 2012 yaitu menggunakan DIPA sebagai pelaksanaan APBN

Sesuai Peraturan:

Pelaksanaan APBN dengan menggunakan DIPA sebagai dasar yaitu : **PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN**

Kesimpulan:

Kemhan Tni sampai saat ini dalam pelaksanaan APBN **belum melaksanakan peraturan seperti Kementerian / Lembaga pada umumnya secara murni.**

LANGKAH LANGKAH MENSUKSESKAN DIPA SEBAGAI PELAKSANAAN APBN

- 1. VALIDASI ORGANISASI**
- 2. PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA**
- 3. PENYIAPAN SARANA PRASARANA**
- 4. PENYIAPAN ANGGARAN**
- 5. TARGET YANG HENDAK DICAPAI**

VALIDASI ORGANISASI

- **TINGKAT KEMENTERIAN**

DITMINLAGAR RENHAN
PUS BMN BARANAHAH
PUSKU KEMHAN

DISATUKAN

BAKU
KEMENTERIAN/
RENUMGAR

- **TINGKAT UNIT ORGANISASI**

BAG LAKGAR/ REN
BAG BMN/ LOG
DIT/DISKU/ BIDKUKEM

DISATUKAN

DINAS
KEUANGAN

- **TINGKAT SATKER**

UNIT PERENCANA
UNIT BMN
UNIT AKUNTANSI
UNIT LK

DISATUKAN

SATKER
MANDIRI



PENYIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

1. INVENTARISASI SDM

- a. Latar Belakang Pendidikan
- b. Latar Belakang Penugasan
- c. Masa Efektif Penugasan

2. PENDIDIKAN KEJURUAN

- a. Prioritas dik kejuruan Perbendaharaan dan Logistik
- b. Pelatihan kepada pejabat perbend oleh KPPN setempat.

PENYIAPAN SARANA PRASARANA

PENYIAPAN :

- 1. SISTIM APLIKASI**
- 2. JARINGAN**
- 3. PERSONAL COMPUTER / LAPTOP**
- 4. MODUL PANDUAN OPERASIONAL SISTEM APLIKASI**
- 5. MODUL PROSES BISNIS LAPORAN KEUANGAN**

PENYIAPAN ANGGARAN

ALOKASI ANGGARAN :

- 1. VALIDASI ORGANISASI**
- 2. PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA**
- 3. PENGADAAN SARANA PRASARANA**
- 4. SOSIALISASI**

TARGET YANG HENDAK DICAPAI

TARGET UTAMA :

1. SELURUH JENIS BELANJA DALAM APBN TA 2019 DAPAT DILAKSANAKAN DIPA .
2. SELURUH SATKER PENERIMA DIPA PETIKAN SUDAH MEMBUAT LK TA 2019

TARGET PENDUKUNG

1. KEGIATAN PENGADAAN SDM DAN SARANA/PRASARANA DILAKSANAKAN ATAS ASAS PRIORITAS DAN BERKESINAMBUNGAN BERDASAR KETERSEDIAAN ANGGARAN.
2. KEGIATAN VALIDASI BADAN KEUANGAN DILAKSANAKAN BERDASAR KAJIAN YANG MENDALAM DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN ADMINISTRASI SISTIM KEUANGAN NEGARA.

**SELESAI
&
TERIMA KASIH**